

## ABSTRAK

Febby Febrian 16042009

### KOORDINASI DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN *STUNTING* DI KOTA PADANG

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan koordinasi kebijakan pencegahan *stunting* di Kota Padang, bagaimana mekanisme koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan *stunting* di Kota Padang dan faktor – faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan koordinasi kebijakan pencegahan *stunting* di Kota Padang. Kebijakan pencegahan *stunting* merupakan kebijakan dalam bentuk perbaikan gizi pada masa 1000 hari pertama kehidupan yang membutuhkan adanya kerja sama lintas sektor. Kebijakan pencegahan secara bersama ini didasarkan kepada Peraturan Presiden No. 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (GNPPG) yang kemudian dijabarkannya tugas dan peran setiap lembaga lintas sektor ke dalam bentuk Dokumen Strategi Nasional Percepatan Pencegahan *Stunting* Periode 2018-2024 dan Dokumen Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten/ Kota Tahun 2018. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskriptif. Penelitian dilakukan pada dinas – dinas terkait yang ada di Kota Padang yang relevan terhadap pelaksanaan koordinasi kebijakan pencegahan *stunting* di Kota Padang. Dinas yang terkait ini sekaligus menjadi informan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan koordinasi kebijakan pencegahan *stunting* di Kota Padang baru berjalan di tingkat sektoral Dinas Kesehatan beserta jajarannya dan belum ada koordinasi antar lintas sektoral dengan instansi lain yang membahas khusus tentang pencegahan *stunting*. Mekanisme koordinasi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pencegahan *stunting* di Kota Padang baru dilaksanakan di tingkat Dinas Kesehatan beserta jajarannya berupa Lokakarya Mini dengan melibatkan tim puskesmas, petugas kecamatan dan tenaga kelurahan melalui program gizi. Faktor penghambat dalam pelaksanaan koordinasi kebijakan pencegahan *stunting* di Kota Padang adalah karena belum adanya regulasi yang mempengaruhi kejelasan fungsi dan tugas pokok dari lembaga yang terlibat, yang juga berpengaruh terhadap tidak adanya anggaran khusus tentang pencegahan *stunting*. Hal ini disebabkan karena anggapan rendahnya kejadian *stunting* di Kota Padang dan Kota Padang tidak termasuk ke dalam daerah Lokus *stunting*.

**Kata Kunci:** Kebijakan, Koordinasi, Implementasi, *Stunting*.